

# Surat Edaran KPU

## Surat Edaran KPU

### Update

### SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

No

Nomor

Judul Peraturan

Download File

1

03/Kpts/Setjen/Tahun 2015

Penunjukan/Penetapan Pejabat Penguasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076

[download\]](#)

2

54/Kpts/KPU/TAHUN 2015

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

[download\]](#)

3

60/Kpts/KPU/TAHUN 2015

Pembentukan 8 (Delapan) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

[download\]](#)

4

63/Kpts/KPU/TAHUN 2015

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

[download\]](#)

5

74/Kpts/KPU/TAHUN 2015

Pembentukan 2 (Dua) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

[download\]](#)

6

85/Kpts/KPU/TAHUN 2015

Pedoman Pemberian Beasiswa Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
[download](#)

7

87/Kpts/KPU/TAHUN2015

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
[download](#)

8

88/Kpts/KPU/TAHUN2015

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
[download](#)

9

95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015

Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
[download](#)

[SE KPU RI Nomor 433/KPU/VIII/2015 Perihal Pencalonan](#)

[SE KPU RI Nomor 409/KPU/VII/2015 Perihal Sistem Informasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada](#)

[SE KPU RI Nomor 410/KPU/VII/2015 Perihal Monitoring dan Siperviisi Permasalahan Pendaftaran Paslon](#)

[SE Ditjen Pajak Nomor 55/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian layanan dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bagi Bakal Calon Kepala Daerah](#)

[SE KPU RI Nomor 401/KPU/VII/2015 Perihal Penyampaian SE Ditjen Pajak](#)

[SE KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah](#)

[SURAT KETUA KPU RI Nomor 398/KPU/VII/2015 Perihal Aplikasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada 2015](#)

[SURAT SEKJEN KPU RI Nomor 1021/SJ/VII/2015 Perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota](#)

[SE KPU RI Nomor 396/KPU/VII/2015 Perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015](#)

[SE KPU RI Nomor 349/KPU/VII/2015 Perihal Pengadaan Bahan Kampanye](#)

[SE KPU RI Nomor 952/SJ/VII/2015 perihal Kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2015 \]](#)

[SE KPU RI Nomor 289/KPU/VI/2015 Tentang PEMASANGAN VSAT](#)

[SE KPU RI Nomor 324 Perihal laporan progres riset 25juni2015\]](#)

[SE KPU RI Nomor. 291 pendaftaranpemantau 8juni2015 \]](#)

Surat Edaran KPU Nomor 282/KPU/VII/2012 Tentang Tentang Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS

Surat Edaran KPU Nomor 356/KPU/VI/2010 Tentang Audit Dana Kampanye Pemilukada.

Surat Edaran KPU Nomor 355/KPU/VI/2010 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Surat Edaran KPU Nomor 353/KPU/VI/2010 Tentang Penyampaian Revisi Term of Reference (TOR) dan Kantor Akuntan Publik Penerima Surat Rekomendasi Audit Dana Kampanye Pemilukada.

Surat Edaran KPU Nomor 351/KPU/VI/2010 Tentang Kepengurusan Beberapa Partai Politik.

Surat Edaran KPU Nomor 350/KPU/VI/2010 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada.

Surat Edaran KPU Nomor 348/KPU/VI/2010 Tentang Pemungutan Suara dalam Pemilukada 2010.

Surat Edaran KPU Nomor 339/KPU/VI/2010 Tentang Pemilukada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Surat Edaran KPU Nomor 337/KPU/VI/2010 Tentang Ijazah.

Surat Edaran KPU Nomor 334/KPU/VI/2010 Tentang Penggantian Calon Terpilih.

Surat Edaran KPU Nomor 332/KPU/VI/2010 Tentang Regulasi Pemilukada.

Surat Edaran KPU Nomor 331/KPU/VI/2010 Tentang Penyampaian Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Pemilukada Kepada Pengawas Pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Surat Edaran KPU Nomor 330/KPU/VI/2010 Tentang Penjelasan Pelaksanaan Kampanye Pemilukada bagi Pejabat Negara sekaligus sebagai Ketua Parpol.

Surat Edaran KPU Nomor 326/KPU/V/2010 Tentang Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Surat Edaran KPU Nomor 323/KPU/V/2010 Tentang Penjelasan Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemilukada.

Surat Edaran KPU Nomor 290/KPU/V/2010 Tentang Penjelasan Persyaratan Pimpinan DPRD yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Surat Edaran KPU Nomor 273/KPU/V/2010 Tentang Permasalahan dalam Tahapan Pemilukada.

Surat Edaran KPU Nomor 260/KPU/IV/2010 Tentang Status Pendidikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

Surat Edaran KPU Nomor 231/KPU/IV/2010 Tentang Hari/Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado.

Surat Edaran KPU Nomor 166/KPU/III/2010 Tentang Pencalonan dalam Pemilukada.

Surat Edaran KPU Nomor 108/KPU/II/2010 Tentang Penjelasan Pelaksanaan Kampanye Pemilukada.

Surat Edaran KPU Nomor 92/KPU/II/2010 Tentang Penyelenggaraan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Pemilukada Tahun 2010.

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2010 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 11/PUU-VIII/2010.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/KPU/II/2010 Tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 50/KPU/II/2010.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/KPU/II/2010 Tentang Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 50/KPU/II/2010 Tentang Pembatalan Surat Edaran Bersama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengembalian kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan/atau Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 142/KMA/XI/2009 tanggal 23 November 2009.

Surat KPU Nomor 1682/KPU/XII/2009 Tentang Tindak Lanjut Terhadap Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu.

Surat Edaran Bersama (SEB) KPU dan Bawaslu Tentang Pembentukan Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(26/01/2010) Legalitas DPP Parpol Dalam Pemilukada.

Surat Edaran Nomor:SE/08/M.PAN/3/2005 Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah.